

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Aqila Azzahra

Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN

e-mail: aqilapuyang31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian berdasarkan Implementasi Program David C.Korten, terdiri dari tiga elemen utama yaitu program, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran, menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Bandung Barat masih rendah. Faktor penghambat program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat meliputi Proses administratif yang rumit serta adanya masalah teknis, Kurangnya dukungan sumber daya, Urgensitas dari program masih terbilang rendah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, menyederhanakan prosedur pembuatan KIA, meningkatkan kapasitas organisasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program.

Kata Kunci: *Implementasi Program, KIA, David C.Korten*

Abstract

This research was conducted at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Child Identity Card (KIA) program at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency, and to find out the inhibiting factors in the implementation of the Child Identity Card (KIA) program at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency. This research uses a qualitative descriptive method with a field study approach. The results of the research based on David C. Korten's Program Implementation, consisting of three main elements, namely the program, program implementation, and target groups, show that the level of KIA ownership in West Bandung Regency is still low. The inhibiting factors of the Child Identity Card (KIA) program at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency include a complicated administrative process and technical problems, lack of resource support, the urgency of the program is still relatively low. Efforts that can be made are strengthening socialization to the community, simplifying KIA making procedures, increasing organizational capacity, utilizing information technology, and conducting periodic evaluations of program implementation.

Keywords: *Program Implementation, KIA, David C.Korten*

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan populasi yang padat, menganggap data kependudukan krusial untuk pembangunan nasional. Meskipun ada regulasi, masih ada warga yang belum terdaftar, menimbulkan masalah administratif (Wahyuni, 2022). Administrasi kependudukan yang efektif mendukung kesejahteraan dan layanan publik (Nagari & Suranto, 2021). Pada 2023, populasi Indonesia mencapai 278,7 juta, meningkat 1,05% dari tahun sebelumnya, dengan 11,27% berusia anak-anak, menandakan pentingnya perlindungan dan pembinaan generasi muda (BPS, 2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2016 untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. KIA adalah identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki pendataan dan pelayanan publik, serta memberikan perlindungan dari diskriminasi dan perdagangan anak. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persyaratan tertentu, memberikan manfaat seperti akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu dari 50 daerah pertama yang menerapkan kebijakan ini, dengan jumlah anak wajib KIA yang signifikan.

Data menunjukkan hanya 26% anak di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), jauh dari target 75% sesuai RPJMN 2020-2024 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, 2023). Ini mengindikasikan kebijakan KIA belum terlaksana dengan baik, dan manfaat KIA belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pembuatan KIA.

Data Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan persentase anak tanpa KIA tinggi di Cipendeuy, Cikalongwetan, dan Cipatat. Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan minimnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil serta sektor swasta, yang berujung pada kurangnya motivasi masyarakat untuk mengurus KIA (Giovani dkk., 2024). Penelitian di Kabupaten Bandung Barat menemukan bahwa sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) belum merata akibat koordinasi yang kurang dengan kecamatan. Sebagai solusi, Disdukcapil setempat meningkatkan sosialisasi melalui program Jebol Darling, yang dilaksanakan 2-4 kali seminggu di setiap desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Selama 2023, program Jebol Darling hanya mencakup 33% desa di Kabupaten Bandung Barat, dengan 62 layanan yang tercatat. Sosialisasi melalui berbagai media belum efektif menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama dalam menyampaikan manfaat KIA. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi program KIA sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memahami Evaluasi Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat dengan cara yang mudah dipahami (Siregar, 2012). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek, melalui pengumpulan dan analisis data di lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa konteks sosial dan interaksi antar individu, grup, dan organisasi (Usman, 2009).

Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung (Iskandar, 2008) terkait Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang memberikan informasi (Iskandar, 2008) tentang Dinas tersebut dan literatur terkait yang mendukung penelitian.

Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, menggabungkan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan 13 informan, termasuk pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta orang tua/wali anak, untuk mengevaluasi program KIA berdasarkan teori David C. Korten. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang luas dari berbagai pihak terkait, menilai kebijakan dan implementasi program, serta mengumpulkan pengalaman dan tantangan penggunaan program KIA. Hasilnya diharapkan memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk peningkatan program. Dokumentasi merupakan informasi penting dalam pengamatan dan wawancara yang bisa

berbentuk teks, seperti biografi dan catatan harian, atau visual, termasuk foto dan film. Menurut Sugiyono, dokumentasi juga mencakup karya ilmiah visual seperti patung.

Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman (1994) untuk analisis data, melalui tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data. Data dari 13 informan direkam secara detail, kemudian direduksi untuk fokus pada informasi penting, yang disajikan secara ringkas untuk memudahkan analisis. Kesimpulan dan verifikasi data akan menghasilkan narasi kontekstual tentang implementasi program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diatur oleh Permendagri Nomor 2 tahun 2016, bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak di bawah 17 tahun yang belum menikah. KIA mencakup data penting seperti NIK, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan lainnya, terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan nasional dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan setempat.



Gambar 1. Visualisasi Kartu Identitas Anak (KIA)

Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk sekolah dan kelurahan/desa, untuk memfasilitasi pembuatan KIA. Tujuan utama KIA, sesuai dengan Permendagri 2 Tahun 2016, adalah untuk meningkatkan pendataan dan perlindungan anak, serta memastikan pelayanan publik dan hak konstitusional mereka terpenuhi. KIA juga berguna sebagai identitas resmi untuk kegiatan bank dan pendaftaran BPJS. Kartu Identitas Anak (KIA) bermanfaat untuk pendaftaran sekolah, pembukaan rekening tabungan, pendaftaran BPJS, klaim asuransi, pengurusan imigrasi, dan pencegahan perdagangan anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) tersedia untuk anak usia 0-17 tahun dan dibedakan menjadi dua tipe: tanpa foto untuk 0-5 tahun dan dengan foto untuk 5-17 tahun. KIA tidak mengandung chip seperti KTP Elektronik. Untuk penerbitan KIA, diperlukan dokumen berupa fotokopi akta kelahiran, KK, KTP elektronik orangtua, pasfoto anak, serta fotokopi paspor dan KITAP bagi WNA. Formulir pendaftaran juga harus diisi. Bila KIA hilang, diperlukan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KK.



Gambar 2. Prosedur Pembuatan KIA

Gambar 2 menggambarkan prosedur pelayanan KIA yang efisien di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimulai dari pengajuan berkas oleh pemohon hingga penerimaan KIA yang dicetak. Layanan ini mengikuti prinsip One day one service tanpa biaya, beroperasi Senin hingga Kamis dari jam 08.00 hingga 16.00 WIB, Jumat hingga 16.30 WIB, dan tutup pada akhir pekan serta hari libur nasional.

Analisis Implementasi Program KIA Kabupaten Bandung Barat

1. Kesesuaian antara program dengan Kelompok Pemanfaat

Kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan target dan memberikan manfaat nyata. Korten menekankan pentingnya kesesuaian antara program dan kebutuhan sasaran. Menurut William N. Dunn (2019), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya memastikan program yang dibuat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak. Program Kartu Identitas Anak diharapkan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data kependudukan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyebutkan:

“Sebagai upaya untuk memastikan seluruh anak Indonesia tercatat dan terlindungi, pemerintah telah menetapkan bahwa setiap anak yang hendak mendaftar sekolah wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Ketentuan ini dibuat untuk memperlancar proses administrasi dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak” (Wawancara 19 Juli 2024)

Program kerjasama pemanfaatan data kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), menawarkan berbagai keuntungan bagi masyarakat. Ini termasuk dukungan administrasi dan akses ke layanan kesehatan serta hiburan untuk anak-anak. Pada Maret 2024, proposal kerjasama ini diperluas untuk melibatkan pelaku UMKM, industri pariwisata, salon kecantikan, toko modern, praktik dokter anak dan gigi, serta klinik non BPJS di Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan fungsi KIA.

Kartu Identitas Anak (KIA) memberikan manfaat tidak hanya di sektor pemerintah tetapi juga bagi anak-anak di sektor swasta, dengan program yang menyesuaikan diri untuk memaksimalkan pemanfaatan sesuai tujuan. Warga Ciwaruga, Parongpong, telah menggunakan layanan online Disdukcapil untuk pembuatan KIA, meskipun sosialisasi resmi masih kurang. Informasi tentang KIA umumnya diketahui melalui sekolah, yang menjadi perantara dalam proses pembuatan kartu tersebut. Hal tersebut didukung oleh pernyataan warga Ciwaruga, Parongpong:

“Untuk saat ini sosialisasi di lingkungan rumah belum ada, hanya saja ada sedikit sosialisasi dari pihak sekolah kemarin karna diwajibkan mempunyai KIA dalam pendaftaran sekolah”(wawancara 18 Juli 2024)

Meski kepemilikan KIA di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, Disdukcapil setempat berupaya meningkatkan jumlah kepemilikan sesuai dengan target strategis mereka. Berikut persentase anak yang memiliki KIA:

Tabel 1. Persentase Anak ber-KIA dalam Indikator Kerja

No	Target Capaian Setiap Tahun	Jumlah
1	Tahun 2024	26%
2	Tahun 2025	28%
3	Tahun 2026	30%

Tabel 1 menunjukkan bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum sepenuhnya mencapai target. Strategi jangka panjang Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat mengindikasikan peningkatan kepemilikan KIA sebesar 2% setiap tahun. Untuk mencapai keberhasilan penuh, perlu adanya upaya berkelanjutan dan dukungan dari semua stakeholder agar manfaat KIA dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Kesesuaian antara program dengan Organisasi Pelaksana

Kesuksesan implementasi program tergantung pada kompetensi pelaksana, seperti yang dijelaskan oleh Merilee S. Grindle dan Korten (1980), yang menekankan pentingnya

kesesuaian antara kemampuan pelaksana dan tugas program. Dalam konteks Program KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas peningkatan pengadaan dan kepemilikan KIA, dengan metode seperti sistem SIDILAN, layanan loket, dan program daring untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data kependudukan.

Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan kesesuaian antara program KIA dan pelaksanaannya, dengan pelayanan yang tersedia secara langsung dan online. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik mereka berada pada kategori baik, dengan skor Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,29. Peningkatan kualitas ini juga didukung oleh pelatihan yang diberikan kepada staf. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjelaskan bahwa:

“Dengan tujuan untuk terus mengembangkan kompetensi para operator, kami telah menginisiasi program Bimtek rutin melalui Zoom. Selain mendapatkan materi dari Dirjen, para operator juga berkesempatan untuk berdiskusi dan mendapatkan bimbingan langsung dari atasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka.” (Wawancara 19 Juli)

Dirjen berencana mengadakan Bimtek secara rutin melalui Zoom untuk meningkatkan kemampuan operator, sesuai wawancara 19 Juli yang menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan program dengan organisasi pelaksana, yang juga bersiap meluncurkan kartu identitas anak, serupa dengan KTP elektronik untuk dewasa. Warga Ciwaruga Parongpong menyebutkan:

“Kualitas petugas kayaknya lebih ditingkatkan lagi terutama hal pengetahuan. Jadi ke masyarakat lebih mudah untuk memberikan pengertian” (Wawancara, 18 Juli 2024)

Meskipun Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat memiliki kesiapan dalam menjalankan program, mereka menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah staf yang hanya empat orang. Namun, petugas tetap berkomitmen untuk bekerja dengan standar tinggi. Pentingnya dukungan organisasi pelaksana diakui untuk keberhasilan program, dan potensi yang belum termanfaatkan sepenuhnya dapat membuka peluang untuk implementasi program yang lebih baik.

3. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Untuk efektivitas program, diperlukan sinergi antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana, serta kesesuaian persyaratan organisasi dengan kemampuan kelompok sasaran. Program KIA di Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem SIDILAN untuk menyelaraskan kebutuhan pemanfaat dengan layanan organisasi, memungkinkan permohonan administrasi kependudukan secara online, termasuk pembuatan KIA.



Gambar 3. Tampilan Muka SIDILAN

Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat mengharapkan SIDILAN dapat mempermudah pembuatan dokumen kependudukan secara online, mengatasi kendala jarak. Didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Strategi untuk saat ini melalui pelayanan online yaitu SIDILAN karna untuk mudah diakses yang terkendala dengan jarak untuk datang langsung ke Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat” (Wawancara 19 juli 2024)

Selaras dengan yang disampaikan masyarakat Cigugur:

“Saya tahu KIA tapi karna bikinnya harus ke Disdukcapil terus jauh kalo darisini jadi saya tidak bikin” (wawancara 18 Juli 2024)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang SIDILAN, namun sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan KIA menjadi 2-3 hari. Proses ini juga didukung oleh sekolah-sekolah, yang membantu orangtua dalam pengumpulan persyaratan yang diperlukan.

Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat memudahkan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kerjasama dengan sekolah, yang terbukti lebih efektif. Orang tua merasa lebih mudah menyerahkan persyaratan melalui sekolah, yang mengurangi biaya dan jarak yang harus ditempuh. Warga Ciwaruga, Parongpong, mengungkapkan rasa terbantu oleh sistem ini. Kerjasama sekolah dengan berbagai lembaga dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan jumlah KIA yang dicetak dan dimiliki.



Gambar 4. Kerjasama Disdukcapil KBB dengan RodalinkID

Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat telah berkolaborasi dengan sektor swasta, termasuk outlet RodalinkID Bandung-Cimoreme, untuk meningkatkan minat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Kerjasama ini mencakup promosi khusus bagi anak pemilik KIA dan pemberian diskon, serta kerjasama dengan tempat wisata. Disdukcapil juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan manfaat KIA.

Faktor Penghambat Program KIA Kabupaten Bandung Barat

1. Proses Administratif yang Rumit dan Masalah Teknis

Proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung Barat sekarang lebih mudah dengan berbagai pilihan akses, namun penggunaan sistem SIDILAN belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Meskipun Disdukcapil setempat telah menerapkan SOP one day one service, dalam praktiknya pembuatan KIA membutuhkan waktu 2-3 hari kerja, sesuai laporan Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan.

“Pembuatan KIA bisa melalui pelayanan online SIDILAN karna lebih gampang dan proses pembuatannya 2-3 hari.” (Wawancara 19 Juli 2024)

Selaras dengan yang disampaikan oleh masyarakat ciwaruga:

“Waktu saya membuat KIA prosesnya 1 mingguan, lumayan lama daripada membuat KTP” (wawancara 18 Juli 2024)

Ketidaksesuaian antara sistem lokal dan pusat tersebut bisa menghambat integrasi data dan penerbitan Kartu Identitas Anak yang efektif.

2. Kurangnya Dukungan Sumber Daya

Program pemerintah, termasuk program KIA di Kabupaten Bandung Barat, memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik SDM maupun sarana dan prasarana, untuk berjalan dengan efektif. Saat ini, dukungan tersebut masih belum optimal. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyebutkan:

“Untuk sekarang karna targetnya banyak jadi kurangnya staf dan alat-alatnya masih kurang karna staf saat ini hanya ada 4, sarana dan prasarana juga karna diluar belum bisa membawa alat” (Wawancara, 19 Juli 2024)

Selaras dengan yang disampaikan oleh petugas pelayanan:

"Sumber daya masih kurang sebetulnya, apalagi sekarang dikejar target jadi penerbitan KIA meluap ditambah kami kekurangan orang di bagian layanan KIA" (wawancara 19 Juli 2024)

Keterbatasan jumlah staf yang berjumlah empat orang dan keterbatasan mobilitas sarana seperti laptop dan alat cetak KIA berdampak pada efisiensi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Urgensi dari Program masih terbilang Rendah

Pada tahun 2023, realisasi Program KIA mencapai 25,8% atau 86% dari target yang ditetapkan sebesar 30%, meningkat dari 24% di tahun 2022. Meskipun ada peningkatan, realisasi ini masih jauh dari 50% jumlah anak wajib KIA. Informasi ini berdasarkan data Renstra dan Penyusunan Pencatatan serta Pelaporan Data Kependudukan.

"Sejauh ini puas dengan progress yang dimiliki yaitu dengan capaian 86% dari target yang diinginkan yaitu sebesar 30% anak. Karna KIA sendiri belum terlalu urgent jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya" (Wawancara, 19 Juli 2024)

Selaras dengan yang disampaikan masyarakat Cigugur:

"kita belum tau manfaat apa aja yang diberikan oleh si KIA ini, jadi mau bikin juga buat apa" (wawancara 18 Juli 2024)

Meskipun ada kepuasan terhadap pencapaian target, tetapi manfaat KIA belum diketahui secara maksimal oleh masyarakat.

Rekomendasi Perbaikan Program

Untuk mengatasi hambatan dalam program Kartu Identitas Anak, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan pelatihan intensif bagi petugasnya untuk memahami dan mengoperasikan sistem SIDILAN dengan lebih baik. Studi oleh Madjid et al. (2021), menunjukkan perlu adanya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang manfaat dan penggunaan sistem tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya anak-anak usia 0-17 tahun, memahami dan mendapatkan hak serta kewajiban mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk pendanaan, sumber daya, dan pelatihan. Investasi dalam teknologi terkini seperti komputer dan printer mendukung efisiensi pembuatan KIA. Studi oleh Ardyati et al. (2022) menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan Sleman dapat meningkatkan manfaat KIA dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur penggunaan KIA untuk memaksimalkan manfaatnya, termasuk kerjasama dengan bisnis lokal seperti taman bermain dan restoran.

Pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) harus disosialisasikan secara luas melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran publik. Penelitian oleh Giovani et al. (2024) menekankan perlunya sosialisasi yang merata di Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk memastikan masyarakat memahami tujuan program KIA. Implementasi strategi ini diharapkan akan mengurangi hambatan dalam pembuatan KIA dan meningkatkan efektivitas pencapaian target.

SIMPULAN

Analisis terhadap Program KIA di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan KIA disebabkan oleh prosedur administratif yang kompleks, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta sosialisasi yang tidak memadai. Masalah teknis dalam pengolahan data dan penerbitan kartu juga menyebabkan penundaan dan kesalahan data. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada target yang ditetapkan, hasil yang dicapai belum sesuai harapan, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Keberhasilan program KIA sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan. Sosialisasi yang efektif dan kebijakan seperti syarat KIA untuk pendaftaran sekolah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, program KIA harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas organisasi pelaksana untuk mencapai efektivitas yang

diharapkan. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan layanan yang ada perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). Jumlah Penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id>.
- Giovani, A. R., Kustiawan, & Pratama, R. A. (2024). Implementasi Program Kartua Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Sungkai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1(No. 1), 296–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.34>
- Nagari, N. R., & Suranto, J. (2021). Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (2016).
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 (2020).
- Wahyuni, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, Vol. 4(No. 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36917/japabis.v4i1.34>